

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*\*Untuk segera diterbitkan*

### **Hari Wiwoho Serahkan 7 LHP atas LKPD Tahun 2022**

**Semarang** – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (BPK Jateng) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 pada Jumat (16/05). Pada acara penyerahan LHP atas LKPD kali ini, Kepala Perwakilan BPK Jateng Hari Wiwoho menyerahkan LHP kepada tujuh pemerintah daerah (pemda), yang diterima oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari masing-masing daerah.

Tujuh pemda yang menerima LHP atas LKPD Tahun 2022 tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Grobogan, Pemkab Temanggung, Pemkab Tegal, Pemkab Pati, dan Pemkab Cilacap. Atas tujuh LKPD tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Digelar di Auditorium BPK Jateng, acara Penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2022 tersebut dihadiri oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Jateng Setyo Esti Agustini dan para kepala subauditorat BPK Jateng. Turut hadir pula sekretaris daerah dan para pejabat struktural dari masing-masing daerah.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Jateng Hari Wiwoho mengatakan, pemeriksaan atas LKPD merupakan tugas konstitusional BPK dan BPK wajib menyerahkan LHP atas LKPD kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai tingkat kewenangannya. Lebih lanjut, Hari menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. “Pemeriksaan atas laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, meskipun telah mendapat opini WTP, BPK masih menemukan beberapa permasalahan, antara lain kekurangan volume pekerjaan; pemberian stimulus PBB-P2 tidak sesuai surat keputusan Bupati; realisasi pembayaran insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melebihi ketentuan; serta pembayaran belanja listrik PJU belum berdasar data pemakaian listrik yang akurat.

Menutup sambutannya, Kepala BPK Jateng Hari Wiwoho menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. “Kami berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat memanfaatkan informasi yang kami sampaikan dalam LHP untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik,” tambahnya.

---

#### **Informasi lebih lanjut:**

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat  
Telp. 024-8660826 Ext. 2013  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)